

ABSTRAK

Satibi Geneva Evene Niang Putiksari (01656190068)

IMPLIKASI HUKUM AKTA PERDAMAIAN (ACTA VAN DADING) DALAM SENGKETA PERDATA

(xii + 127 halaman; 3 lampiran)

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (“Perma 1/2016”), semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Proses perdamaian tidak hanya dapat dilakukan melalui proses di pengadilan, melainkan dapat juga dilakukan oleh para pihak melalui notaris yang akan menghasilkan akta notaris. Namun demikian perlu dipahami bahwa dengan adanya akta perdamaian notaris tidak lantas membuat perkara selesai begitu saja yang mana hingga kini terdapat beberapa kasus dimana akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris berujung kepada gugatan kembali di pengadilan yang menyebabkan lahirnya permasalahan. Penelitian ini akan menganalisa kekuatan mengikat akta perdamaian (*acta van dading*) notariil yang cacat hukum dan implikasi hukum akta perdamaian (*acta van dading*) yang tidak dilaksanakan oleh para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan jenis data berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis adalah studi kepustakaan dengan teknik analisis data berupa analisis kualitatif. Pendekatan yang Penulis gunakan adalah pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dari tesis ini adalah suatu akta perdamaian dapat dikatakan cacat hukum apabila melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata. Jika syarat kesatu dan kedua tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalannya. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian yang buat oleh para pihak batal demi hukum. Pembatalan tersebut mengakibatkan suatu akta perdamaian menjadi tidak mempunyai akibat hukum. Implikasi hukum akta perdamaian (*acta van dading*) apabila terdapat salah satu pihak tidak menjalankan atau melaksanakan isi perjanjian, maka pihak yang beritikad baik dapat mengajukan eksekusi dan pemenuhan dapat di paksakan oleh eksekusi pengadilan.

Referensi: 36 (1981 – 2020)

Kata Kunci: Notaris, Mediasi, Acta Van Dading

ABSTRACT

Satibi Geneva Evene Niang Putiksari (01656190068)

LEGAL IMPLICATION OF A SETTLEMENT DEED (*ACTA VAN DADING*) WITHIN A CIVIL DISPUTE

(xii + 127 pages; 3 attachments)

In accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 regarding Mediation Procedure in the Court (“Perma 1/2016”), all civil dispute submitted to the court shall be resolved through mediation first. This settlement process not necessarily shall be conducted through the court, however it can be carried out through a notary who will resulting a notarial deed. However, the existence of a notary settlement deed does not necessarily resolve the cases, which up to this date, there are several cases where the settlement deed made before the notary led to a lawsuit in court which caused problems. This research will analyze the binding force of the notarial settlement deed (*acta van dading*) is now legally disabled and the legal implication of the settlement deed (*acta van dading*) which is not carried out by the parties. This research is a normative research with the type of data in the form of secondary data. The data collection technique used by the author is a literature study with data analysis techniques in the form of qualitative analysis. The approach that the author uses is the legal approach, and the case approach. The result of this thesis is that a settlement deed may be stated as legally disabled if it violates Article 1320 of the Indonesian Civil Code. If the first and second condition is not fulfilled, then the agreement may be cancelled or requested to be cancelled. However, if the third and fourth condition is not fulfilled, then the agreement will be void by law. This cancellation causes a settlement deed to have no legal consequences. The legal implication of a settlement deed (*acta van dading*) is that if one of the parties does not carry out their obligations within the agreement, then the party with good faith may submit execution and the fulfilment may be coerced through a court execution.

References: 36 (1981 – 2020)

Keywords: Notary, Mediation, *Acta Van Dading*